

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 kepala pemerintah daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan yaitu kepastian tersedianya dana dari pemerintah sesuai dengan urusan yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang ada di daerah tersebut dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan pendapatan lain yang sah serta sumber pembiayaan (Bahar, 2009: 137).

Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri, termasuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada kepala daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sebagai sumber utama pembiayaan pemerintah daerah PAD dihasilkan dari beberapa sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dan lain-lain dari PAD yang sah (Bahar, 2009:140).

Sumber pendapatan daerah tidak hanya itu saja ada juga dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi

lokal, memberikan dukungan dan kontribusi di bidang perekonomian di suatu wilayah atau daerah (Nurman, 2015: 183).

Indonesia adalah negara yang kaya akan Sumber Daya Alam dan budaya yang beragam, tidak sedikit Sumber Daya dan budaya yang kita punya. Indonesia yang terbentang dari sabang sampai merauke memiliki Alam yang sangat indah, terdapat banyak destinasi yang kaya budaya dan dibalut dengan keindahan alam. Berwisata sudah tidak jarang lagi dilakukan oleh orang-orang bahkan sekarang berwisata sudah menjadi kebutuhan hidup setiap orang, dengan banyaknya tempat wisata di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di sektor pariwisata. Bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, pariwisata juga dapat menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, dan juga dapat melestarikan alam dan budaya.

Menurut Soekadijo (1996:3), Pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu. Dan kepariwisataan merupakan suatu lingkup usaha yang terdiri atas ratusan komponen usaha, sebagiannya besar kecil. Terdapat juga usaha jasa-jasa penerimaan tamu dan perusahaan perkemahan dan sebagian toko-toko pengecer, toko-toko makanan, dan perusahaan perkemahan dan sebagian toko-toko pengecer, toko-toko makanan serta pompa bensin.

Dengan adanya pariwisata pendapatan suatu negara dan daerah dapat meningkat. Pengunjung bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar

aktivitas yang didapat dari berwisata, dengan berbelanja, menghilangkan kejenuhan dan mencari kepuasan diri dari berwisata melihat indahnya alam ciptaan tuhan. Pemerintah telah mengelompokkan dan menyebarkan kunjungan wisatawan di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang termasuk dalam wilayah tujuan wisata yang sudah tidak asing dan tidak jarang lagi.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan, potensi Indonesia untuk mengembangkan sektor pariwisata sangat besar. Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal dengan keberagaman suku bangsa dengan obyek wisata yang beragam yang membuat daerah ini memiliki daya tarik tersendiri untuk para wisatawan. Daerah Istimewa Yogyakarta selain kota pendidikan juga memiliki budaya dan tradisi yang dikenal banyak orang. Dengan memiliki kekayaan alam yang melimpah membuat pemerintah DIY sangat mendukung sektor pariwisata.

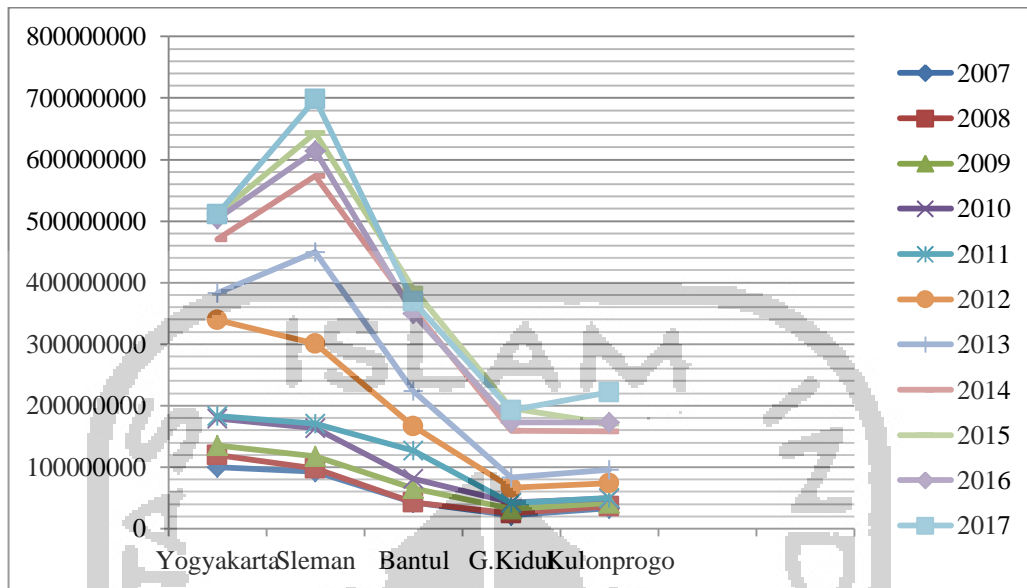
Keindahan alam di pulau Jawa sejatinya tidak kalah dengan Pulau Bali. Tidak hanya keindahan pantai yang ditawarkan tetapi juga keindahan lain yang dapat dinikmati disini. Pariwisata di DIY memang tidak setua pariwisata di Bali karena pariwisata di Bali telah bermula sejak masa kolonial Belanda. Karna dunia pariwisata di Bali jauh lebih dahulu dibandingkan dengan pulau Jawa, maka hampir semua destinasi wisata yang ada di Bali sudah terjamah, tidak lagi dalam bentuk alami.

Dari beberapa obyek tersebut tentu saja bisa menjadi peluang dalam pengembangan pariwisata. Pengelolaan secara baik tentu bisa menarik para

wisatawan asing maupun domestik, dengan begitu jumlah pengunjung bisa lebih meningkat dan tentu saja akan mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah dan juga memberi peluang pada pemerintah daerah untuk memakmurkan masyarakat.

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung pada jumlah kedatangan jumlah wisatawan yang datang. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan bisa mendorong penanaman modal dalam negeri dan modal asing agar pembangunan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar. Pembangunan kepariwisataan khususnya pengembangan obyek-obyek wisata diperlukan suatu penelitian. Obyek wisata di DIY sangat perlu dilakukan agar dapat ditentukan strategi pengembangannya. Pemerintah harus mengetahui dan menginventarisasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang terdapat pada obyek-obyek wisata yang dikembangkan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang digunakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan menggunakan PDRB sebagai indikator makro dapat dianalisis penjumlahan nilai bruto yang didapatkan dari semua kegiatan ekonomi yang terdapat didaerahnya dalam suatu periode tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau dari seluruh unit ekonomi yang terdiri dari jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Tahun 2007-2017, diolah.

Gambar 1.1

Pendapatan Asli Daerah DIY

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa nilai pendapatan asli daerah DIY setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Kenaikan pendapatan asli daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2011 menuju 2012 di Kabupaten Gunungkidul yaitu dengan nilai kenaikan sebesar Rp. 25.215.367 (ribu rupiah), sedangkan kenaikan pendapatan asli daerah paling kecil terjadi pada tahun 2015 menuju 2016 di Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar Rp. 1.612.284 (ribu rupiah). Sementara di DIY dari tahun 2007 hingga 2017 tingkat pendapatan asli daerah sendiri mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun tidak begitu signifikan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta sktruktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Dengan menggunakan perhitungan pendekatan PDRB ADHK, menjelaskan mengenai perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitasnya, dengan tidak disertai adanya perubahan harga. PDRB ADHK menurut lapangan usaha artinya PDRB yang dilihat dengan menggunakan pendekatan produksi. Dalam hal ini, menjelaskan bahwa PDRB dihitung dari penjumlahan dari nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh beragam unit produksi di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. (Bank Indonesia, 2014)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan

modal dalam negeri untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Ketentuan menanam modal ditentukan oleh Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha negeri, ataupun pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yaitu Kegiatan usaha-usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanam modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan.

Dengan tumbuhnya investasi, maka diharapkan akan terjadi akselerasi roda perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai strategis demi mendongkrak pertumbuhan investasi di DIY antaranya dengan penentuan area investasi, mencari pembeda atau ciri khas yang menjadi keunggulan daerah, dan kolaborasi dengan setiap pihak. DIY memiliki beberapa keunikan dari segi investasi karena predikatnya sebagai kota budaya, pendidikan serta demografi dan pariwisatanya. Pertumbuhan realisasi investasi di DIY dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Yogyakarta yaitu jumlah wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan

nusantara, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan investasi yang mana semua variabel tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari potensi di DIY yang terus mengalami perkembangan, salah satunya terdapat jumlah obyek wisata baru yang dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung sehingga pendapatan asli daerah meningkat. Dengan begitu juga dapat menarik minat investasi baik dari pihak swasta maupun dari pemerintah atau pun dari pihak dalam negeri atau luar negeri sehingga dapat meningkatkan di sektor perdagangan, perhotelan, ataupun sektor lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Bagaimana pengaruh Investasi PMDN terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD di Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap PAD di Yogyakarta.

3. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap PAD di Yogyakarta.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebagai dasar acuan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui berbagai macam faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah seperti jumlah wisatawan, PDRB, dan Investasi di Yogyakarta dan untuk menambah wawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah di Yogyakarta.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dibuat untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang penelitian yang dijelaskan oleh penulis. Bab I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan. Pada Bab II menjelaskan kajian pustaka yang memuat teori-teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan digunakan sebagai perbandingan dan landasan teori yang memuat teori-teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti, dan juga berisikan diskripsi secara teoritis tentang variabel-variabel ekonomi yang di ambil dari literatul yang relevan. Pada Bab III berisi tentang uraian bahan atau materi penelitian, alat, jalan penelitian, variabel dan data yang akan di kumpulkan dan analisis hasil. Bab IV memaparkan pengujian atas data penelitian yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta

pembahasan lebih lanjut hasil penelitian dan hasil analisis data. Pada Bab V berisi tentang kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasan sebelumnya dan saran baik untuk pemerintah daerah maupun penelitian selanjutnya.

